

POPPY MIRANDA SIKRIPSI.pdf

by 16 Perpustakaan UMSIDA

Submission date: 05-Aug-2024 06:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 2427641430

File name: POPPY MIRANDA SIKRIPSI.pdf (278.53K)

Word count: 5724

Character count: 36811



PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH, DAN WAKTU PENETAPAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI KECAMATAN SIDOARJO

THE INFLUENCE OF BUDGET PLANNING, REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS, AND BUDGET DETERMINATION TIME ON BUDGET ABSORPTION IN SIDOARJO DISTRICT

Poppy Miranda Siska Putri
NIM : 202001300016
Sigit Hermawan SE., M.Si., Dr.
NIDN : 0003127501

4
SKRIPSI

Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juli, 2024

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH, DAN WAKTU PENETAPAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI KECAMATAN SIDOARJO

THE INFLUENCE OF BUDGET PLANNING, REGIONAL DEVELOPMENT INFORMATION SYSTEMS, AND BUDGET DETERMINATION TIME ON BUDGET ABSORPTION IN SIDOARJO DISTRICT

Poppy Miranda Siska Putri¹ Sigit Hermawan, SE., M.Si., Dr.²

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Email : putripoppy160@gmail.com Email : sigithermawan@umsida.ac.id

ABSTRACT

This research aims to test whether budget planning, regional government information systems, and the timing of budget determination time influence budget absorption in sub-districts in Sidoarjo District. The data source used in the research is primary data. The population in this study were all sub-districts in the Sidoarjo District (12 sub-districts). The total sample is 52 people in each sub-district who have authority over budget management in the sub-district, namely: Budget User Authority (KPA) 14 people, Technical Activity Implementation Officer (PPTK) 14 people, Assistant Expenditure Treasurer (BPP) 14 people, and Administrative staff for the financial department is 10 people. The data analysis method uses multiple linear regression analysis. The research results show that budget planning and budget determination time influence budget absorption. Meanwhile, regional government information systems have no effect on budget absorption.

Keywords : Budget Planning, Regional Development Information systems, budget determination time, budget absorption

PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran adalah pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan kemungkinan tercapainya dalam jangka waktu tertentu [1]. Tingkat serapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sebagai indikator ketidakmampuan birokrasi masih sering isu penting yang diperbincangkan oleh para pengamat ekonomi maupun organisasi non-pemerintah LSM berbasis masyarakat [2]. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pemerintahan yaitu serapan anggaran yang rendah pada awal tahun dan seiring dengan peningkatan pada berakhirnya tahun anggaran terdapat perbedaan penyerapan anggaran [3]. Perbedaan penyerapan anggaran menyebabkan tidak meratanya pembangunan seluruh aspek kebutuhan nasional. Anggaran belanja memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan jika diterapkan dengan baik, dapat merevitalisasi perekonomian daerah. Penyerapan anggaran adalah suatu bentuk pengukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai target yang sudah direncanakan. Apabila sudah mencapai target maka penyerapan anggaran bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan anggaran. Seluruh kelurahan di Kecamatan Sidoarjo tidak terlepas dari permasalahan serapan anggaran. Sebagai contoh pada lampiran penyerapan anggaran Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo Tahun 2021 dan 2022. Pada sistem informasi keuangan daerah tercatat pencapaian realisasi anggaran rata-rata 89% masih dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 96%.

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dijalankan melalui rencana-rencana yang ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, baik rencana satu tahun ataupun rencana jangka panjang [4]. Setiap tahunnya, pemerintah daerah menyusun rencana keuangan dalam satu tahun yang dituangkan ke dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perencanaan dan penganggaran APBD tertuang dalam undang-undang No. 25 Tahun 2004 [5] tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 [6] tentang Keuangan Negara. Rencana kerja anggaran dan rencana kerja SKPD akan diberikan kepada DPRD sebagai bahan kajian dalam menyusun rancangan usulan APBD (RAPBD) untuk ditetapkan menjadi APBD. Menurut teori *stakeholder*, pemerintah daerah berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagai pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan daerah, pemerintah dapat memaksimalkan kemajuan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan yang optimal dan pelaksanaan program yang tepat sasaran akan mempermudah pelaksanaan kegiatan pembangunan. Aspek perencanaan yang tidak disusun secara matang pada saat anggaran yang diajukan telah ditetapkan, maka rencana kerja tersebut tidak akan terlaksana dengan lancar. Hal ini disatu sisi disebabkan belum adanya keselarasan antara rencana anggaran dengan rencana kinerja yang akan dijalankan mengakibatkan rendahnya serapan anggaran pada salah satu faktor tersebut [7]. Perencanaan anggaran yang buruk adalah akan mencegah peningkatan penyerapan anggaran dan hal ini dapat memperburuk semua kesulitan dalam melaksanakan penyerapan anggaran.

Pemerintah daerah saat ini dan di masa depan diharapkan dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan program pembangunan di semua sektor, untuk menyebarkan informasi secara optimal dan melibatkan semua orang dalam skala besar [8]. Sesuai dengan permendagri No. 77 Tahun 2020 [9] tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Pemerintah membutuhkan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi keuangan komprehensif lainnya yang mencakup informasi mengenai posisi keuangan daerah [10]. Tujuan pengelolaan SIPD adalah hendaknya terselenggaranya pengelolaan Informasi daerah secara kompeten sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 [11] bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan informasi pemerintah daerah dan dapat menyediakan serta mengelola informasi pemerintah daerah Lainnya. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo sudah memakai Sistem Informasi Pemerintah Daerah sejak tahun 2020 yang sebelumnya memakai *Regional Development system* (RDS). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 [12] yang mengatur jenis SIPD untuk pemerintah daerah mengembangkan menjadi beberapa kelompok yang salah satunya, informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi daerah memungkinkan data keuangan daerah dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui berbagai unsur yang saling berhubungan, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang relevan seperti : penganggaran daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pada intansi tertentu masih banyak pegawai yang belum memahami penggunaan sistem secara menyeluruh. Diperlukan adanya pelatihan dalam penerapan sistemnya namun pemerintah hanya melakukan sosialisasi. Sehingga dalam penginputan dilakukan dengan bantuan pihak luar.

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 [6] tentang Keuangan Negara, waktu penetapan Anggaran merupakan susunan setiap rencana kerja dan anggaran selama satu tahun kedepan. Batas waktu untuk menetapkan APBD ditetapkan paling lambat bulan November, atau 1 (satu) bulan sejak penetapan anggaran APBN. Persoalan dalam serapan anggaran pemerintah salah satunya adalah gagal tercapainya target serapan anggaran terlebih pada triwulan pertama oleh karena itu mengakibatkan terjadinya pengumpulan belanja pemerintah pada triwulan akhir [13]. Bahwa setiap penetapan anggaran pemerintah baik itu secara terlambat ataupun tidak terlambat berpengaruh pada penyerapan anggaran pemerintah. Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri, menerangkan bahwa waktu penetapan anggaran [15] adalah penetapan APBD yang dilaksanakan agar rencana kegiatan dan program pembangunan dapat terlaksana pada tahun anggaran, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik [14]. Salah satu faktor yang menyebabkan APBD menjadi terlambat yaitu hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak selaras [15]. Anggaran yang diusulkan pihak eksekutif memiliki peran penting memperluas Lembaga secara finansial dan non finansial. Pihak legislatif juga menggunakan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan konflik dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan tertundanya waktu penetapan anggaran.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Menurut teori *stakeholder*, pemerintah daerah berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagai pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan daerah, pemerintah dapat memaksimalkan kemajuan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan yang optimal dan pelaksanaan program yang tepat sasaran akan mempermudah pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hubungan antar variabel perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan Anggaran yang baik adalah direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan dan menyusun kegiatan dengan detail. Semakin baik perencanaan anggaran akan semakin mudah dalam penyerapan anggarannya.

Penelitian yang dilakukan [16] menyatakan perencanaan tidak berpengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pada OPD terkait perencanaan dimana ada anggapan tidak semua usulan anggaran disetujui dan hal ini [4] berarti perencanaan anggaran tidak dapat mempengaruhi serapan anggaran. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [17] menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran.

H₁ = Perencanaan Anggaran berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran

Stewardship Theory dalam akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara *shareholder* dan manajemen atau hubungan antara atasan dan para bawahan sebuah organisasi. Pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran [18]. Sesuai peraturan pemerintah No. 101 pasal 2d terkait *Good Governance* adalah pemerintah yang baik menerapkan dan mengembangkan beberapa prinsip. Salah satunya prinsip efektivitas dan efisiensi untuk penggunaan sistem dalam pengelolaan anggaran yang baik dan benar. Hubungan antar variabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap penyerapan anggaran.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan alat mengelola data keuangan daerah untuk penginputan anggaran yang nantinya akan di sahkan kemudian dilakukan pencairan. Penelitian yang dilakukan [19] menyatakan penggunaan SIPD telah efisien. Ini nampak jelas para pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara merasa mempermudah pekerjaannya sehingga menjadi lebih cepat. Menurut penelitian yang dilakukan [20] masih ada kekurangan dan banyak kendala yang didapatkan seperti proses input mengalami keterlambatan yang sangat disayangkan karena sistem ini masih ba¹³

H₂ = Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

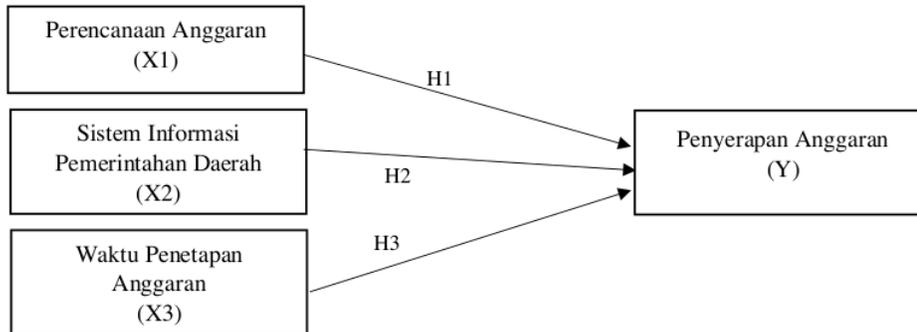
Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan antar manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Dalam melakukan penyusunan anggaran dilakukan oleh *agent* atau pihak eksekutif yang mempunyai tugas Menyusun anggaran. *Principal*¹² atau pihak legislative bertugas mengawasi, menolak, dan menerima anggaran yang telah disusun[21]. Sesuai peraturan pemerintah No. 101 pasal 2d terkait *Good Governance* adalah pemerintah yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, efektivitas, kualitas layanan, pada prinsip akuntabel lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggung jawaban untuk mengambil keputusan dan kegiatan ya¹³ dilakukan.

Hubungan antar variabel waktu penetapan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Waktu Penelitian Anggaran adalah salah satu indikator pengukuran kinerja menurut Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam ketepatan wa¹³ dalam menetapkan APBD. Penelitian yang dilakukan oleh [22] yang melaksanakan pengambilan data pada Kab/Kota di Provinsi Aceh, menyatakan bahwa waktu pen⁷apan anggaran tidak berpengaruh positif pada penyerapan anggaran pemerintah. sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh masih belum dapat sepenuhnya memanfaatkan penganggaran tepat waktu yang memaksimalkan tingkat serapan anggaran. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan Penelitian oleh [23] dapat memaksimalkan waktu saat penetapan anggaran sehingga berpengaruh positif sehingga serapan anggaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

H₃ = Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan berbagai penjelasan dan hubungan antar variable serta tujuan penelitian untuk menguji hipotesis dapat dijelaskan dengan kerangka pemikiran dibawah ini :



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif Asosiatif. Menurut [24] penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sample dalam penelitian ini adalah yang mempunyai wewenang pada pengelolaan anggaran di Kelurahan yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 14 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 14 orang, Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) sejumlah 14 orang, dan Staf Administrasi bagian keuangan sebanyak 10 Orang. Sehingga jumlah seluruhnya didapat 52 Orang.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode Sensus. Dengan membagikan kuisioner untuk diisi. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari tempat pertama penelitian atau dari sumber data asli subjek penelitian.

Variabel Dependen

Penyerapan Anggaran (Y) Dimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan p⁵embangunan-pembangunan yang akan dicapai, dan kegiatan yang akan dijalankan selama satu tahun anggaran [22]. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

Indikator Penyerapan Anggaran :

1. Prosedur dalam penyerapan
2. menelaraskan dengan kebutuhan dalam satu tahun
3. kesesuaian dengan dokumen pelaksana anggaran

Variabel Independen

Perencanaan Anggaran (X1) sebagai acuan untuk penyusunan anggaran pada hakikatnya adalah suatu proses penyusunan rencana belanja, pengeluaran, pemasukan, dan keuangan dalam jangka waktu tertentu, termasuk mengenai kesesuaiannya dengan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, kebutuhan organisasi (prioritas), partisipatif serta revisi (kesalahan administrasi), ketetapan waktu (disiplin) [25]. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

Indikator Perencanaan Anggaran :

1. Pendekatan-pendekatan dalam penyusunan anggaran
2. Evaluasi anggaran tahun sebelumnya
3. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X2) diprogram oleh Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk melancarkan serangkaian tahapan penyusunan rencana kerja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan [19]. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

Indikator Sistem Informasi Pemerintah Daerah :

1. Sarana dan prasarana yang mendukung
2. Efisiensi dalam penginputan anggaran
3. Kemudahan dalam menggunakan sistem informasi

Waktu Penetapan Anggaran (X3) yang sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan berdasarkan UU [6] Tentang keuangan negara yaitu bulan November atau 1 Bulan Setelah penetapan APBN. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

Indikator Waktu Penetapan Anggaran :

1. Evaluasi waktu penetapan pada tahun sebelumnya
2. Partisipasi dalam waktu penentuan anggaran
3. Sesuainya kebutuhan pada setiap bulannya

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Penelitian ini dengan mengaplikasikan SPSS (*statistical package for social science*). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, adalah teknik analisis dengan menghubungkan antara dua variabel independent atau lebih (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y) dengan persamaan dibawah ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana Y adalah Penyerapan Anggaran, α adalah konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah koefisien regresi, X_1 adalah Perencanaan Anggaran, X_2 adalah Sistem Informasi Pemerintahan daerah, X_3 adalah Waktu Penetapan Anggaran dan ϵ adalah Error. Hipotesis statistik dirumuskan seperti dibawah ini :

H_0 : tidak terdapat pengaruh positif variabel X (Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran) terhadap variabel Y (Penyerapan Anggaran Pada Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo).

H_1 : terdapat pengaruh positif pada variabel X Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran) terhadap variabel Y (Penyerapan Anggaran Pada Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo).

Kemudian untuk mengetahui diterima atau tidak diterima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji T. dengan ketentuan sebagai berikut :

1. $t_{tabel} > t_{hitung}$ Maka H_0 diterima H_1 ditolak artinya variabel Independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen
2. $t_{tabel} < t_{hitung}$ Maka H_1 diterima H_0 Ditolak artinya variabel berpengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji generalisasi dari data yang diteliti [26]. Dalam studi ini, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggeneralisasi data berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel yang diselidiki. Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	52	21	35	28.12	2.805
Sistem Informasi Pemerintah Daerah	52	25	38	31.04	2.793
Waktu Penetapan Anggaran	52	23	35	27.94	2.682
Penyerapan Anggaran	52	19	40	31.56	3.977
Valid N (listwise)	52				

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan variable menunjukkan nilai hasil yang baik ditandai dengan nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi. Analisis uji deskriptif sebagai berikut:

- Jumlah sampel yang digunakan sebagai responden sebanyak 52 responden.
- Variabel Perencanaan Anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum 35 dengan nilai mean sebesar 28.12 dan nilai standar deviasi sebesar 2.805. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data kurang bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya.
- Variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 25 dan nilai maksimum 38 dengan nilai mean sebesar 31.04 dan nilai standar deviasi sebesar 2.793. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data kurang bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya.
- Variabel Waktu Penetapan Anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum 35 dengan nilai mean sebesar 27.94 dan nilai standar deviasi sebesar 2.682. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran kurang bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya.
- Variabel Penyerapan Anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum 40 dengan nilai mean sebesar 31.56 dan nilai standar deviasi sebesar 3.977. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran kurang bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya.

2 Uji Validitas

Hasil pengujian validitas dapat diperoleh nilai Pearson sebesar 0.2306. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai indikator penelitian, karena masing-masing dari instrumen variable memiliki nilai pearson di atas 0.2306. Berikut hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Item	R _{tabel}	Nilai Pearson	Keterangan
X1.1	0.2306	0.857	Valid
X1.2	0.2306	0.713	Valid
X1.3	0.2306	0.308	Valid
X1.4	0.2306	0.857	Valid
X1.5	0.2306	0.448	Valid
X1.6	0.2306	0.857	Valid
X1.7	0.2306	0.553	Valid
X2.1	0.2306	0.544	Valid
X2.2	0.2306	0.632	Valid
X2.3	0.2306	0.357	Valid
X2.4	0.2306	0.510	Valid
X2.5	0.2306	0.763	Valid
X2.6	0.2306	0.750	Valid
X2.7	0.2306	0.760	Valid
X2.8	0.2306	0.489	Valid
X3.1	0.2306	0.424	Valid
X3.2	0.2306	0.518	Valid
X3.3	0.2306	0.620	Valid
X3.4	0.2306	0.732	Valid
X3.5	0.2306	0.668	Valid
X3.6	0.2306	0.711	Valid
X1.7	0.2306	0.576	Valid
Y1	0.2306	0.882	Valid

Y2	0.2306	0.481	Valid
Y3	0.2306	0.882	Valid
Y4	0.2306	0.348	Valid
Y5	0.2306	0.764	Valid
Y6	0.2306	0.757	Valid
Y7	0.2306	0.672	Valid
Y8	0.2306	0.668	Valid

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024

9

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* > 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha (> 0.7)	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	0.729	Reliabel
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X2)	0.730	Reliabel
Waktu Penetapan Anggaran (X3)	0.712	Reliabel
Penyerapan Anggaran (Y)	0.842	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan utama analisis regresi linier berganda adalah memastikan persamaan regresi dan mengevaluasi pengaruh variable independent, yakni: Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran sebagai variabel dependen [27]. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.168	5.875		-.710	.481
	Perencanaan Anggaran	.521	.158	.367	3.301	.002
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah	-.137	.158	-.096	-.866	.391
	Waktu Penetapan Anggaran	.907	.148	.611	6.134	.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024

Berdasarkan analisis tabel 4., maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
$$\text{Penyerapan Anggaran} = -0.4168 + 0.521PA - 0.137SIPD + 0.907WPA + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil pengujian R² menunjukkan nilai *Adjusted R Square* adalah 0.508 atau 50.8%. Menurut nilai ini, nilai Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran bertanggung jawab atas 50.8% dari variasi Penyerapan Anggaran, sedangkan sisanya sebesar 49.2% dijelaskan oleh variabel tambahan, yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.537	.508	2.789

a. Predictors: (Constant), Total Item Waktu Penetapan Anggaran, Total Item Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Total Item Perencanaan Anggaran

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024

Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji T

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	Keterangan
Perencanaan Anggaran	3.301	1.67722	0.002	H1 Diterima
Sistem Informasi Pemerintah Daerah	-0.866	1.67722	0.391	H2 Tidak Diterima
Waktu Penetapan Anggaran	6.134	1.67722	0.000	H3 Diterima

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024

PEMBAHASAN

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.301 > t_{tabel} yakni sebesar 1.67722 dan nilai sig. $0.002 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga H1 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang baik adalah direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan dan menyusun kegiatan dengan detail. Semakin baik perencanaan anggaran akan semakin mudah dalam penyerapan anggarannya. Sesuai dengan teori *stakeholder*, Perencanaan yang optimal dan pelaksanaan program yang tepat sasaran akan mempermudah pelaksanaan kegiatan pembangunan [17]. Sejalan dengan *stewardship thory* pada pengelolaan organisasi fokus pada harmonisasi antara *principles* (Rakyat) dengan *steward* (Lembaga Negara) dalam mencapai tujuan bersama, pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerja dalam pembuatan program kerja dan rencana untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang [18]. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mengatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran [17]. H4 ini dikarenakan perubahan perilaku tergantung niat pelaku, hal ini menggarisbawahi pentingnya keterkaitan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja yang akan dicapai. Apabila seseorang mempunyai keyakinan terhadap tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerja orang tersebut. Konsep dalam perencanaan penggunaan anggaran yang sebenarnya akan mengarahkan penggunaan anggaran secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, semakin mudah proses pelaksanaan atau realisasi anggaran pada saat tahun berjalan, yang pada akhirnya akan menaikkan tingkat serapan anggaran belanja. Sehingga dapat disimpulkan adanya Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.866 < t_{tabel} yakni sebesar 1.67722 dan nilai sig. $0.391 > 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga H2 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran belanja tidak terpengaruh oleh pengelolaan anggaran dengan aplikasi SIPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mengatakan bahwa sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran [28]. Hal ini dikarenakan SIPD yang dikembangkan oleh Kemendagri tidak terlepas dari berbagai kekurangan dalam pengembangan perangkat lunak. Beberapa kendala yang sering ditemui antara lain sering terjadi sistem bermasalah, kurangnya koordinasi antar pengguna SIPD, sering terjadi kesalahan input karena ada banyak menu yang harus diisi, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi berbeda. Selain itu, pergeseran anggaran sering tertunda, sistem penggajian tersendat, dan ada hambatan dalam proses penyusunan anggaran kas, serta dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D. Dalam pembuatan dokumen-dokumen tersebut tidak ada sangkutannya dengan hasil serapan anggaran karena jika terdapat kesalahan dalam penginputan dapat di revisi Kembali. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut tidak mempengaruhi penyerapan anggaran belanja [20]. Kurangnya pelatihan dalam menggunakan SIPD sehingga kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD tidak berjalan dengan baik. Dengan menunjukkan tanggapan responden tentang Sistem Informasi menunjukkan rata-rata tanggapan responden ragu dan tidak setuju terhadap penyerapan anggaran membuktikan bahwa Sistem Informasi sudah cukup baik namun perlu di perbaiki lagi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa SIPD tidak mempengaruhi penyerapan anggaran [29]. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada Pengaruh Sistem Pemerintahan Daerah terhadap Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa Waktu Penetapan Anggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6.134 > t_{tabel} yakni sebesar 1.67722 dan nilai sig. $0.000 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga H3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengatakan bahwa Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran [30].

Pada dasarnya, proses penetapan anggaran yang tepat waktu (sebelum tahun anggaran berakhir) akan mempengaruhi tingkat serapan anggaran, karena jangka waktu atau rentang waktu pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efisien dan terarah untuk seluruh kegiatan pemerintahan [31]. Penelitian ini tidak sejalan penelitian terdahulu hal ini dapat disebabkan karena Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh belum mampu memanfaatkan secara maksimal manfaat penetapan anggaran tepat waktu untuk memaksimalkan tingkat penyerapan anggaran di daerahnya masing-masing [32]. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan serapan anggaran yaitu hubungan eksekutif dan legislatif karena tidak selaras. Keterlambatan dalam menetapkan anggaran menyebabkan proses administrasi akan terhambat. Proses pengadaan barang/jasa tidak terlaksana tepat waktu, menyebabkan proses tanda tangan kontrak akan terlambat. Banyak kegiatan tidak dapat dilakukan dengan sempurna sampai akhir tahun anggaran hal tersebut akan mempengaruhi serapan anggaran pada akhir tahun [15]. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

PENUTUP KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menunjukkan apakah perencanaan anggaran, sistem informasi pemerintahan daerah, dan waktu penetapan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo. Berdasarkan diskusi hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, (2) sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dan (3) waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan sampel atau objek penelitian yang berbeda agar hasil yang diperoleh lebih bervariasi. Selain itu, diharapkan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh variabel lain selain yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, seperti karakteristik daerah, jenis pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan ukuran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Abdullah, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah," *KINERJA*, vol. 8, pp. 209–210, Jan. 2017, doi: 10.24002/kinerja.v8i2.898.
- [2] M. Zarinah, D. Darwanis, and S. Abdullah, "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara," *J. Magister Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 90–97, 2016.
- [3] Suwarni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi Pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5), 1–7.," *Publika*, vol. 6, no. 5, pp. 1–7, 2017.
- [4] Mutmainna and M. Iqbal, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," *Assets*, vol. 7, no. 1, pp. 120–132, 2017, [Online]. Available: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/3937>
- [5] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, "UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, pp. 1–32, 2004, [Online]. Available: http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf
- [6] UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, "Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003," *Demogr. Res.*, vol. 49, no. 0, pp. 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen, 2003.
- [7] A. Emkhad Arif, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011".
- [8] Gede Sandiasa; Putu Agustana, "Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah", [Online]. Available: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/824>
- [9] P. K. daerah Perda, "Permendagri_No_77_Tahun_2020_Pedoman_Teknis_Pengelolaan_Keuangan_Daerah_1f853ed2a2.pdf."
- [10] H. G. Muhammad Tamrin, "ANALISIS PERENCANAAN DAN KUALITAS SDM PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG Analysis Of The Planning And Quality Of Employee Human Resources To The Level Of Absorption Of Apbd Budget Through The Regional Financial Information System At The," *Bata Ilyas Educ. Manag. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 34–50, 2021.
- [11] permenkes 9 tahun 2014, "Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014," *Lincoln Arsyad*, vol. 3, no. 2, pp. 1–46, 2014, [Online]. Available: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- [12] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah," *Kementeri. Dalam Negeri Republik Indones.*, vol. Nomor 65, no. 879, pp. 2004–2006, 2019.
- [13] R. Nugroho, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN (Studi Persepsi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)," *J. BPPK Badan Pendidik. dan Pelatih. Keuang.*, vol. 10, no. 1, pp. 22–37, 2017, doi: 10.48108/jurnalbppk.v10i1.23.
- [14] S. B. Surbakti, "Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara".
- [15] C. A. P. dan I. T. R. 2010 Wangi, "No Title," "Identifikasi Fakt. Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggar. 2008-2010)." *Simp. Nas. Akunt. XIII. Univ. Jenderal Soedirman. Purwokerto, 13- 15 Oktober 2010*, 2010.
- [16] N. Laila Yuliani and L. Lestari, "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja," *Bus. Econ. Conf. Util. Mod. Technol.*, vol. 3, pp. 648–663, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unimma.ac.id>
- [17] M. A. S. Rifka Ramadhani, "PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN

- ANGGARAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGADAAN BARANG/ JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT”, [Online]. Available: <http://jea.pj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/104>
- [18] A. Frankoe, K. Kamaludin, and F. Fadli, “Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan E-Procurement terhadap Penyerapan Anggaran,” *Manag. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 28–55, 2021, doi: 10.33369/tmr.v3i1.19604.
- [19] D. Alfani and J. Nasution, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 1, pp. 4036–4043, 2022.
- [20] M. I. Nasution and N. M.Si, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 2, p. 109, 2021, doi: 10.29103/jak.v9i2.4577.
- [21] P. Waktu and P. Anggaran, “178330166 - Hashfi Luthfilhadi - Fulltext,” 2022.
- [22] I. Hanif and S. Suparno, “Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh,” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 107–115, 2017, [Online]. Available: <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/5218>
- [23] R. Ruhmaini, S. Abdullah, and D. Darwanis, “Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,” *J. Perspekt. Ekon. Darussalam*, vol. 4, no. 1, pp. 31–43, 2019, doi: 10.24815/jped.v4i1.10914.
- [24] R. (2016) Rusiadi., Subiantoro, Nur dan Hidayat, “Metode Penelitian : Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel.”.
- [25] C. Malahayati, Islahuddin, and H. Basri, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh,” *J. Adm. Akunt. Progr. Pascasarj. Unsyiah*, vol. 4, no. 1, pp. 11–19, 2015.
- [26] M. Ramdhan, *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara., 2021.
- [27] B. Nugraha, *Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik*, Pertama. Pradina Pustaka, 2022.
- [28] E. Erliyani and S. Sulastiningsih, “Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Aplikasi Sipd Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Magelang,” *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 3, no. 4, pp. 1279–1303, 2023, doi: <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i4.854>.
- [29] S. Siamsa, “Penyerapan Anggaran APBD Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Merauke Berdasarkan Perencanaan Dan Kualitas SDM Pegawai,” *Econ. Digit. Bus. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 2022–206, 2022, doi: 10.37531/ecotal.v3i1.241.
- [30] R. Ruhmaini, S. Abdullah, and D. Darwanis, “Analisis serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam,” *Darussalam J. Econ. Perspec.*, vol. 4, no. 1, pp. 31–43, 2018, doi: <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10914>.
- [31] H. Mauliansyah, “PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN, BESARAN SISA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA), DAN PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA).” Universitas Syiah Kuala, 2017.
- [32] I. Hanif and Suparno, “Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh,” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 2, no. 4, 2017.

LAMPIRAN

Tabel 1. Capaian Realisasi Anggaran Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo

No.	Nama Kelurahan	2021	2022
		Capaian Realisasi	Capaian Realisasi
1	Kelurahan Bulusidokare	94,01%	90,87%
2	Kelurahan Celep	94,25%	89,84%
3	Kelurahan Cemengkalang	94,19%	89,29%
4	Kelurahan Gebang	94,89%	92,53%
5	Kelurahan Lemahputro	93,85%	91,23%
6	Kelurahan Magersari	94,1%	91,54%
7	Kelurahan Pekauman	94,1%	91,1%
8	Kelurahan Pucang	94,38%	89,32%
9	Kelurahan Pucanganom	94,6%	92,64%
10	Kelurahan Sekardangan	94,62%	90,92%
11	Kelurahan Sidokare	94,33%	91,16%
12	Kelurahan Sidoklumpuk	93,31%	89,75%
13	Kelurahan Sidokumpul	94,94%	89,84%
14	Kelurahan Urangagung	94,93%	90,5%

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Daerah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

KUISIONER

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Umur :
 Pendidikan Terakhir :
 Lama Bekerja :
 Jabatan :

II. Petunjuk Pengisian

Pengisian dilakukan oleh Pengelola Anggaran di lingkungan Kelurahan Kecamatan Sidoarjo. Untuk menjawab pertanyaan dengan membubuhkan tanda centang (✓) pada setiap 5 pilihan alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan berikut :

Keterangan :

SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral/Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

1. Penyerapan Anggaran (Y)

No.	Pertanyaan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Dalam Penyerapan Anggaran Kelurahan sudah sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.					
2.	Kelurahan telah mengikuti prosedur dalam penyerapan anggaran dengan jumlah yang tercantum dalam DPA.					
3.	Ketepatan jadwal penyerapan setiap bulan					
4.	Ketepatan jadwal penyerapan setiap triwulan					
5.	Prosedur pencairan sudah sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku.					
6.	Anggaran yang direalisasikan mampu mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan.					
7.	Sistem Informasi yang mendukung untuk melakukan penyerapan.					
8.	Anggaran yang diserap terdapat di Sistem Informasi					

2. Perencanaan Anggaran (X1)

No.	Pertanyaan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan anggaran Kelurahan					
2.	Ketepatan data dalam penyusunan perencanaan anggaran di kelurahan					
3.	Pendekatan dan instrument yang digunakan dalam penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku					
4.	Perencanaan anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya					
5.	Revisi anggaran tidak mengalami keterlambatan/tidak memerlukan waktu yang lama					
6.	Dilakukan evaluasi anggaran tahun sebelumnya, saat Menyusun anggaran					
7.	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kelurahan.					

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X2)

No.	Pertanyaan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Di Kelurahan saya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.					
2.	Adanya Sarana dan Prasarana yang mendukung					
3.	Kelurahan sudah dilengkapi sambungan internet yang memadai.					
4.	Didukung oleh sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, dan presisi.					
5.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memudahkan kegiatan penyediaan data dan informasi					
6.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah lebih efisien daripada harus menginput manual penyediaan data dan informasi.					
7.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mudah diakses.					
8.	Pada Sistem Informasi Pemerintahan pengolahan anggaran sangat efektif dan efisien.					

4. Waktu Penetapan Anggaran (X3)

No.	Pertanyaan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Dalam menentukan waktu penetapan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan.					
2.	Melakukan evaluasi waktu penetapan anggaran tahun sebelumnya.					
3.	Dalam menentukan waktu penetapan anggaran dilakukan oleh pejabat/staf yang berkaitan dengan keuangan					
4.	Melakukan penyerapan sudah sesuai dengan waktu penetapan anggaran					
5.	Keterlambatan waktu penetapan anggaran dapat mempengaruhi penyerapan anggaran					
6.	Dalam penentuan waktu penetapan anggaran memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini.					
7.	Sering mengalami kesulitan dalam penetapan anggaran					

POPPY MIRANDA SIKRIPSI.pdf

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.indo-intellectual.id Internet Source	2%
2	journal.unimma.ac.id Internet Source	2%
3	www.jurnal.umpar.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	2%
5	www.researchgate.net Internet Source	2%
6	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	2%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	eprint.stieww.ac.id Internet Source	1%
9	proceeding.unmuhjember.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to stie-pembangunan Student Paper	1 %
11	Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati. "THE EFFECT OF AWARENESS, MORALITY, TAX CULTURE, AND DISTRIBUTIVE JUSTICE ON THE TAXPAYER COMPLIANCE", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2021 Publication	1 %
12	Submitted to Weehawken High School Student Paper	1 %
13	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
14	ojs.uma.ac.id Internet Source	1 %
15	123dok.com Internet Source	1 %
16	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On